BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang memiliki potensi besar dalam bidang perikanan budidaya. Salah satu komoditas unggulan yang menjadi prioritas pengembangan adalah ikan patin *(Pangasius sp).* Melalui potensi ikan patin tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan daerah. Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peran penting dalam memberdayakan pembudidaya ikan patin agar mampu mengelola usaha budidayanya secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan di sektor perikanan. Pelaksanaan kebijakan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Peraturan ini menegaskan bahwa pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kemandirian pelaku usaha perikanan agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dan berdaya saing.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

Sebagai pelaksana kebijakan di daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan dalam merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan patin melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan. Melalui peran tersebut, dinas perikanan diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi budidaya ikan patin yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pembudidaya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kelompok pembudidaya ikan patin, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakn beberapa program pemberdayaan antara lain program bantuan benih ikan patin, bantuan sarana dan prasarana budidaya seperti pakan ikan, pompa air, dan jaring, serta kegiatan penyuluhan dan penguatan kelembagaan kelompok. Program bantuan benih ikan patin bertujuan membantu pembudidaya dalam memenuhi kebutuhan benih awal guna meningkatkan produksi, namun pelaksanaannya belum optimal karena jumlah bantuan yang terbatas dan distribusinya yang belum merata. Program bantuan sarana dan prasarana budidaya seperti pakan ikan, pompa air, bibit ikan, dan jaring ditujukan untuk menunjang efektivitas kegiatan budidaya, akan tetapi bantuan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembudidaya sehingga maasih menimbulakan kendala dalam proses produksi. Program penyuluhan dan pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam teknik budidaya ikan patin, namun keterbatasan intensitas penyuluhan menyebabkan peningkatan pemahaman pembudidaya belum merata. Selanjutnya, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan

program penyuluhan kelembagaan kelompok yang bertujuan memperkuat kemandirian dan ketertiban administrasi kelompok pembudidaya. Namun, dalam pelaksanannya kelembagaan kelompok belum berjalan optimal karena masih rendahnya kearifan anggotan serta kemampuan pengelolaan organisasi kelompok.

Pelaksanaan pemberdayaan juga memiliki prosedur dan persyaratan tertentu. Hanya kelompok pembudidaya yang telah terdaftar secara resmi di Dinas Perikanan yang dapat menerima pembinaan dan bantuan. Pendaftaran dilakukan melalui penyuluh perikanan dengan melampirkan berita acara pembentukan kelompok dan kelengkapan administrasi, seperti buku kelompok dan kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan). Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas bersifat terstruktur menekankan pendekatan kelembagaan kelompok.

Berdasarkan observasi terdapat beberapa masalah dalam pembudidaya ikan patin antara lain:

1. Kurangnya sarana dan prasarana di Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memadai seperti sarana operasional lapangan, peralatan teknis budidaya seperti pakan ikan, pompa air, bibit ikan, dan jaring, serta fasilitas pendukung pelatihan dan sosialisai. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pembinaan, pendampingan dan pelatihan belum dapat dilaksanakan secara rutin dan merata, sehingga jangkauan program pemberdayaan terhadap seluruh kelompok pembudidaya masih terbatas dan pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan fasilitas yang tersedia.

2. Kurangnya petugas yang profesional dalam kegiatan pemberdayaan ikan patin di Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi kendala dalam implementasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan patin. Jumlah pegawai dan penyuluh yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang ada, sehingga intensitas kunjungan lapangan belum dapat dilakukan secara rutin dan merata.
3. Kurangnya pendampingan dari pihak Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam membudidaya ikan patin. Kondisi ini menyebabkan sebagian pembudidaya ikan patin belum sepenuhnya memahami tujuan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan. Akibatnya, pelaksanaan program pemberdayaan di lapangan belum berjalana sesuai dengan perencanaan dan tujuan kebijakan yang telah di tetapkan.

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam proses analisa data penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut, sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III:

a. Komunikasi *(Communication)*
b. Sumber Daya *(Resources)*
c. Disposisi atau Sikap Pelaksana *(Disposition Of Implementers)*
d. Struktur Birokrasi *(Bureaucratic Structure)*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan kelompok budidaya ikan patin oleh Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan kelompok budidaya ikan patin oleh Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan patin oleh Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan kelompok budidaya ikan patin oleh Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambahkan wawasan dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait implementasi

kebijakan pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan patin, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan pemberdayaan. Selain itu, penelitian ini juga meberikan pemahan kepada kelompok pembudidaya ikan mengenai hak dan dukungan yang tersedia dari pemerintah serta strategi untuk memanfaatkannya. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan atau penyempurnaan kebijakan pemberdayaan perikanan.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI